

Desi Pratiwi

FINLANDIA, “A COUNTRY OF READERS”

Negara paling bahagia di dunia adalah Finlandia, versi World Happiness Report Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2018, yang dirilis dalam rangka Hari Kebahagiaan Internasional yang diperingati setiap tanggal 20 Maret. Penilaian ini diukur dari sisi pendapatan, harapan hidup sehat, dukungan sosial, kebebasan, kepercayaan kepada pemerintah, dan kemurahan hati. Negara berpenduduk 5,5 juta orang ini menempati peringkat paling stabil, paling aman, dan paling baik di dunia. Thegurdian.com (14/03/2018) menulis bahwa polisi Finlandia adalah yang paling terpercaya di dunia dan bank-banknya paling bagus.

Theguardian.com (15/05/2018) juga melaporkan bahwa PBB menyebut Finlandia sebagai negara paling terpelajar di dunia pada tahun 2016. Bangsa Finlandia adalah salah satu pengguna perpustakaan umum paling antusias di dunia, dengan seluruh penduduk di negara itu meminjam hampir 68 juta buku setahun. Mereka juga memanfaatkan situs web finna.fi nasional untuk mencari informasi yang berasal dari perpustakaan, lembaga kearsipan, dan museum.

Reformasi Undang-Undang Kearsipan

Finlandia merupakan bagian dari Swedia dari abad ke-12 hingga

tahun 1809, yang pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini dengan bahasa Swedia yang digunakan luas dan merupakan salah satu bahasa resmi. Kemudian, wilayah ini masuk dalam Kekaisaran Rusia sampai Revolusi Rusia 1917 yang menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan Finlandia.

Didirikan pada tahun 1816,

lembaga kearsipan Finlandia saat itu merupakan bagian dari Senat Finlandia. Gedung arsip di Helsinki baru dibangun pada tahun 1890. Pada tahun 1939, lembaga kearsipan Finlandia menjadi lembaga pemerintah pusat sendiri dengan nama National Archives Service. Organisasi kearsipan ini memiliki dua nama yakni dalam bahasa Swedia (Riksarkivet), yang



Arsip Nasional Finlandia berada di Tiga Lokasi (Sumber: Arsip Nasional Finlandia)



Gedung Arsip Nasional Finlandia di Helsinki.
(Sumber: Wikipedia)

diadopsi pada tahun 1939, dan dalam bahasa Finlandia (*Kansallisarkisto*) sejak tahun 1994.

Sejak tahun 1880 dan seterusnya, para Direktur Arsip Nasional memperoleh gelar *State Archivist*. Jabatan *Director* kemudian diubah menjadi *Director General* pada tahun 1992, meskipun gelar *State Archivist* terus diberikan kepada Director General saat ini. Unikinya, antara tahun 1949 dan 1992, *State Archivist* juga diberikan gelar Profesor.

Amandemen Archives Act 1146/2016, Pasal 14 a menyatakan bahwa setelah digitasi, Arsip Nasional Finlandia akan memutuskan pemusnahan dokumen analog asli yang telah diperintahkan untuk dilestarikan secara permanen. Pemusnahan dokumen analog asli diizinkan tanpa

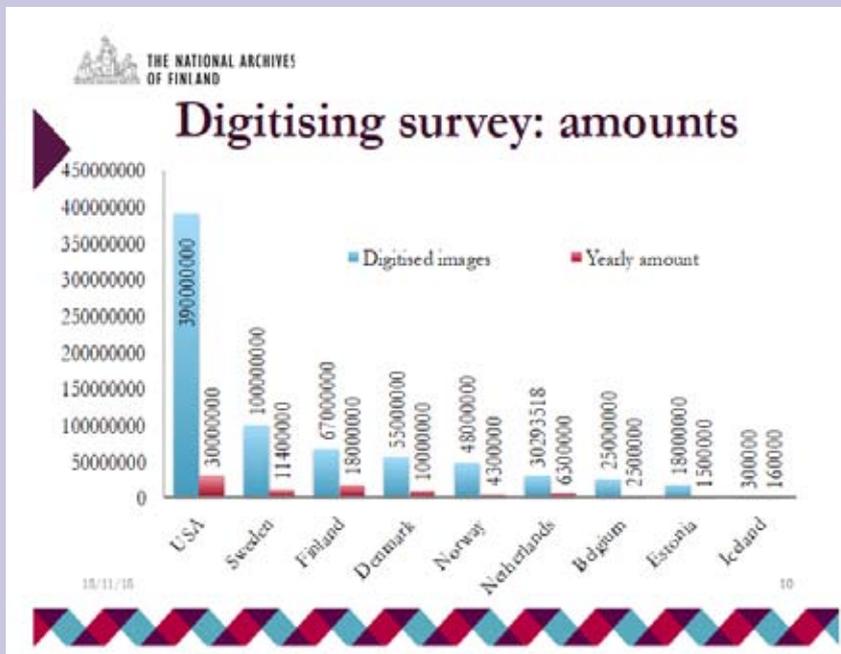
mengorbankan pelestarian permanen dari konten informasi atau integritas dan autentikasi dokumen asli serta jika hal itu tidak menyebabkan hilangnya nilai budaya atau sejarah atau kekuatan pembuktian hukum dokumen asli.

Reformasi Undang-Undang Kearsipan adalah kunci dalam reformasi National Archives Service, yang berubah namanya menjadi National Archives sejak awal tahun 2017. Arsip Nasional Finlandia saat ini berada di 3 lokasi, yaitu Helsinki (pusat Arsip Nasional), dan tujuh kantor Arsip Nasional di Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Mikkeli, Oulu, Turku, dan Vaasa (sebelumnya adalah arsip provinsi), serta Sámi Archive di Inari yang didirikan tahun 2012.

Arsip Nasional Finlandia, yang

berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempromosikan penggunaan dokumentasi warisan budaya yang berorientasi pada pelanggan, beroperasi sebagai ahli terkemuka dalam kegiatan kearsipan, mendukung metode memperbarui penelitian ilmiah, dan meningkatkan ketersediaan informasi kearsipan yang terbuka.

Nilai-nilai Arsip Nasional Finlandia didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara internasional serta prinsip-prinsip etika dari sektor kearsipan dan komunitas riset. Nilai-nilai kunci yang membimbing operasional Arsip Nasional Finlandia adalah: keterbukaan, ketidakberpihakan, dan kebebasan.



Arsip Nasional Finlandia Menduduki Posisi Terbanyak Ketiga dalam Digitalisasi Arsip Per Tahun. (Sumber Arsip Nasional Finlandia)

Strategi 2020

Arsip Nasional Finlandia menyusun strategi tahun 2010–2015 untuk melakukan penelitian tentang kemungkinan pemusnahan bahan-bahan arsip kertas yang bernilai guna permanen, setelah didigitalisasi, asalkan nilai guna ilmiah dan kekuatan pembuktian dari bahan arsip tersebut tidak membahayakan.

Strategi tahun 2016–2020 disusun sejalan dengan Resolusi Pemerintah Finlandia tahun 2020 untuk meningkatkan ketersediaan informasi kepada publik, dengan titik keberangkatan pada kegiatan digitalisasi bahan-bahan arsip analog yang diserahkan ke Arsip Nasional Finlandia. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh *letter of intent* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Finlandia awal bulan Juli 2017 yang menetapkan bahwa semua bahan administrasi publik yang harus diarsipkan akan diarsipkan dalam media dan format digital, dan semua bahan-bahan



Dokumen Tertua yang Disimpan di Arsip Nasional Finlandia adalah Surat Tanggal 1 Oktober 1316 tentang Pelindungan Raja Biger Magnusson kepada Kaum Perempuan di Karelia (Sumber: Arsip Nasional Finlandia)

analog yang masih dimiliki badan publik akan didigitalkan hingga tahun 2030. Menurut Keputusan Pemerintah tanggal 21 Juni 2017, Arsip Nasional hanya akan menerima arsip digital untuk disimpan, yang berarti mayoritas bahan-bahan arsip analog akan dimusnahkan setelah digitasi.

Arsip Nasional Finlandia telah menentukan bahwa pemusnahan arsip setelah digitasi hanya berlaku untuk arsip yang dibuat setelah tahun 1992 dan memenuhi ketentuan yang

disebutkan sebelumnya. Finlandia bukan satu-satunya negara di mana Undang-Undang Kearsipannya mengizinkan pemusnahan arsip analog setelah digitalisasi tetapi negara ini menjadi pelopor dalam pelaksanaan pemusnahan arsip setelah digitasi.

Digitalisasi arsip telah dilakukan di Arsip Nasional Finlandia sejak tahun 1999, dan menjadi suatu sistem sejak tahun 2003. Saat ini, khazanah Arsip Nasional Finlandia berjumlah 210 kilometer linier, dengan arsip tertua berasal dari tahun 1316. Dari volume khazanah arsip yang ada, sejumlah 70 juta gambar digital ditambah 2 juta peta dan gambar arsitektur telah diakses dalam format elektronik oleh 90% pengunjunnya. Hal ini menjadikan Finlandia sebagai negara terbanyak ketiga di dunia dalam melakukan digitalisasi arsip per tahun, di bawah Amerika Serikat dan Swedia. Arsip Nasional Finlandia telah mendigitalkan delapan belas juta *file* pada tahun 2017.

Arsip Nasional Finlandia merencanakan proyek digitalisasi massal arsip pemerintah yang sebagian didanai oleh *European Regional Development Fund* (ERDP). Bulan Oktober–Desember tahun 2017, Arsip Nasional Finlandia melakukan survei kearsipan nasional untuk mengetahui jumlah arsip yang tersimpan di instansi pemerintah, dan menemukan total ada sekitar 380 kilometer linier arsip, yang sekitar 170 kilometer linier akan disimpan secara permanen dan ditransfer ke tempat penyimpanan arsip Nasional.

Proyek digitalisasi massal di sini mengacu pada digitalisasi bahan-bahan dalam skala besar sebagai proses terorganisasi dan industri. Digitalisasi massal berbeda dari

MANCANEGARA

metode digitalisasi lainnya, terutama karena proses digitalisasi tidak disesuaikan menurut jenis bahan-bahan atau organisasi, yang khas dalam digitalisasi ini dilakukan dalam bentuk proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mempersiapkan rencana implementasi untuk proses digitalisasi, mulai dari transfer bahan-bahan dari instansi pemerintah untuk digitalisasi dan berakhir pada konversi bahan-bahan menjadi format digital dan pemusnahan objek analog.

Pada lingkungan internasional yang lebih luas, dialog profesional secara khusus telah membahas pemusnahan setelah digitalisasi dengan cara yang kritis. Untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Kearsipan yang baru, Arsip Nasional Finlandia melakukan survei melalui *mailing list* berbagai arsip nasional, jaringan ICARUS (*International Centre for Archival Research*), dan berbagai saluran media sosial. Survei itu ditanggapi oleh perwakilan dari empat puluh lembaga kearsipan, perpustakaan, dan perusahaan dari semua negara Nordik, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, dan Austria. Temuan utamanya adalah bahwa digitalisasi massal belum dilakukan di mana pun di dunia dalam konteks kearsipan. Karena manifestasi analog belum dimusnahkan setelah digitasi, referensi internasional tentang praktik yang baik tidak tersedia.

Hanya empat dari semua lembaga kearsipan yang menanggapi survei telah menyiapkan instruksi untuk memusnahkan objek penyimpanan analog setelah digitasi. Arsip Nasional Australia adalah satu-satunya responden yang menyiapkan instruksi untuk digitalisasi yang memungkinkan pemusnahan bahan-bahan analog. Selandia Baru tidak menanggapi



Proses Digitalisasi Arsip di Arsip Nasional Finlandia.
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

survei, tetapi menerbitkan instruksi pemusnahan pada bulan Mei 2017.

Selain Finlandia, tiga negara (Belgia, Norwegia, dan Portugal) sedang mempertimbangkan persiapan instruksi pemusnahan, karena undang-undang nasional mereka saat ini memungkinkan pemusnahan bahan-bahan setelah digitasi. Meskipun demikian, Belgia dan Norwegia memiliki sikap kritis terhadap setiap pemusnahan. Arsip nasional Belanda, Islandia, Swedia, dan Republik Ceko, Arsip Sejarah Uni Eropa dan Arsip Kota Lüneburg menekankan pada tanggapan mereka bahwa mereka tidak siap untuk memusnahkan arsip analog warisan budaya yang ada dalam format arsip. Negara-negara yang menanggapi survei belum memulai atau merencanakan digitalisasi bahan-bahan arsip yang sangat baru,

dan digitalisasi telah difokuskan pada peningkatan kegunaan bahan-bahan arsip yang sudah ada dalam lembaga kearsipan mereka, bahan-bahan arsip yang paling sering digunakan atau bahan-bahan arsip yang paling berharga dalam hal budaya sejarah.

Bagaimanapun, proses digitalisasi massal ini memakan waktu lebih dari sepuluh tahun, dan itu akan memerlukan koordinasi yang efektif serta, yang terpenting, komitmen yang kuat. Instansi pemerintah harus berkomitmen untuk jadwal dan instruksi digitalisasi yang ditetapkan bersama untuk persiapan bahan-bahan. Arsip Nasional Finlandia harus berkomitmen memimpin proses digitalisasi, dan kementerian yang mengarahkan proses harus berkomitmen untuk menetapkan tujuan dan keberlangsungan operasional.